# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Landasan Teori

### 1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;

b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;

c. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;

d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);

e. Penyusunan rancangan perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

f. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokan atas (Mardiasmo, 2002):

a. PAD

b. Dana perimbangan

c. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah

peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemda yang bersangkutan dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemda kota maupun kabupaten karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Realisasi PAD antar kota atau kabupaten setiap tahunnya dapat bervariasi, karena potensi setiap pos penerimaannya juga mengalami perkembangan.

Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas (Mardiasmo, 2002):

a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah tersebut. Retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seorang atau badan jasa yang nyata dari pemda, seperti pelayanan pekerjaan, pertukaran barang, atau ijin yang dikeluarkan oleh pemda. Pungutan ini dikenakan atas kegiatan untuk

mengadakan pengawasan atas kegiatan tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan (Mardiasmo, 2002).

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum

satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja menurut kelompoknya terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Mardiasmo, 2002).

Belanja pegawai adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

**2. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Melalui kebijakan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) diharapkan masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini karena selama pemerintahan orde baru hasil SDA lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat (Devas, 1989 dalam Mardiasmo, 2002).

Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) pusat-daerah. Walaupun Indonesia terkenal sebagai daerah yang kaya akan SDA tetapi penyebarannya tidak merata di seluruh daerah. Daerah kaya SDA misalnya Riau, Kalimantan Timur, Aceh, dan Irian Jaya akan mendapatkan dana bagi hasil yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lain yang miskin sumber daya alam. Pada sisi yang lain Jakarta dan kota besar

lainnya akan memperoleh dana bagi hasil pajak (Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Beban Pajak Harta Tidak Bergerak (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh)) yang cukup besar, sebagai konsekuensi terkonsentrasinya pusat bisnis di kota metropolitan.

Fenomena seperti ini akan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan fiskal antar daerah, yang pada akhirnya melalui kebijakan ekspansi pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan antar daerah dan wilayah.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2002). Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pada organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik karena melibatkan pihak legislatif. Tidak demikian pada sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik yang tidak diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi (Abdullah dan Halim, 2003):

a. Aspek perencanaan;
b. Aspek pengendalian; dan
c. Aspek akuntabilitas publik.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus *(oversight body)* yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

**4. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan

pemeliharaannya (Mardiasmo, 2002). Menurut Halim (2004a:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003:36) juga menyatakan menyatakan hal senada. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penegalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992). Belanja modal menurut (Mahmudi, 2006), meliputi:

a. Belanja Tanah,
b. Belanja Peralatan dan Mesin,
c. Belanja Gedung dan Bangunan,
d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
e. Belanja Aset Tetap Lainnya,
f. Belanja Aset Lainnya

**5. Pendapatan Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan hasil-hasil kegiatan ekonomi di suatu daerah selama satu tahun. PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi

dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan umum yang dapat digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

1) Pertanian

2) Pertanian dan Pertanian yang terbagi menjadi tiga subsektor

3) Industri Pengolahan; yang terbagi menjadi dua subsektor, yaitu;

a) Industri Migas,

b) Industri tanpa Migas

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1) pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba,

2) konsumsi pemerintah,

3) pembentukan modal tetap domestik bruto,

4) perubahan stok, dan

5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan

jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

**6. Pertumbuhan Ekonomi**

Boediono (1993) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan suatu output dalam jangka panjang. Penekanan pada arti proses disini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama misalnya 10, 20 atau 50 tahun bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kecenderungan yang bersumber dari proses internal perekonomian itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, dan pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan [illegible] jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah dari tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan per kapita riil yang berlangsung terus-menerus yang bersumber dari dalam daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/ wilayah/ daerah. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya infrastruktur ekonomi.

PDRB merupakan salah satu indikator dalam menggambarkan kegiatan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, jadi PDRB semakin tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Pujiati (2008) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaanya untuk membiayai kegiatan pembangunan, namun di era desentralisasi fiskal harapan itu belum optimal yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ketahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

## B. Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

### 1. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik, 2002). Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar (http://www.Balipost.co.id).

Adanya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa menggunakan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan pembelanjaan lainnya. Sehingga semakin besar DAU, maka belanja modal juga akan semakin meningkat.

Dalam penelitiannya Holtz-Eakin *et al.* (1994) dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh teman empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan logika hipotesis dan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis:

$H_1$ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

**2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal**

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak seluruh pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Secara empiris juga ditemukan

Moisio (2002) dalam Abdullah dan Halim (2006) menyatakan bahwa orang akan lebih hemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grants* atau *transfer*).

Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, namun kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004; Abdullah dan Asmara 2006 dalam Abdullah dan Halim, 2006).

Jika pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah tinggi maka daerah tersebut dapat melakukan belanja secara menyeluruh untuk menaikan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. PAD salah satunya dilakukan untuk melakukan belanja modal. jika belanja modal suatu daerah bagus maka fasilitas di daerah tersbut bagus. sarana dan prasarana dapat di penuhi. sehingga mendatangkan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim dalam Abdullah dan Halim (2006) menemukan bahwa pendapatan daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan logika hipotesis dan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis:

**3. Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiscal yang beragam. Perbedaan ini pada gilirannnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisiensi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat.

Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Berdasarkan logika hipotesis dan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis:

**4. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan petumbuhan ekonomi di daerah (Brata, 2004 dalam Harianto dan Adi, 2007). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006).

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) mengemukakan bahwa keberhasilan peningkatan PAD

hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut BAPENAS (2003), pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Brata (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dengan petumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian oleh Tambunan (2006), menyatakan Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah. Penelitian Harianto dan Adi (2007) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

$H_4$ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004 dalam Harianto dan Adi, 2007). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi

sarana penunjang lainnya. Persyaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002 dalam Harianto dan Adi, 2007). Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.

Jika PEMDA menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Dalam penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan logika hipotesis dan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis:

**6. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal**

Adanya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa menggunakan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemerintahan daerah (Pemda) harus dituntut mandiri dengan di terapkannya desentralisasi di Indonesia. DAU seharusnya di anggap sebagai dana yang dapat dimanfaatkan oleh suatu daerah berkonsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. DAU harus digunakan secara efektif dan efisien agar kemandirian daerah tercapai. salah satunya yaitu DAU digunakan untuk belanja salah satunya belanja modal. belanja modal dilakukan untuk memperbaiki saran dan prasarana daerah. sehingga fasilitas daerah menjadi bagus (jalan, jembatan dll) sehingga dengan sarana dan prasaran yang bagus maka investor akan tertarik untuk masuk ke daerah tersbut sehingga otomatis dengan banyak investor masuk maka PE akan naik. jika sarana dan prasarana baik maka masyarakat daerah tersbut dapat melakukan kegiatan ekonomi sehingga PE akan naik. contohnya dengan dibuat kan jalan atau jembatan masyarakt bisa melakukan kegiatan perdagangan antar desa atau sesama daerah, dengan berjalannya roda ekonomi maka PE akan naik pula. Berdasarkan logika hipotesis dan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis:

H$_{10}$: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

**7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal**

Pemda harus dituntut mandiri dengan di terapkannya desentralisasi di Indonesia. PAD seharusnya di anggap sebagai dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk dapat suatu daerah berkonsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. PAD harus digunakan secara efektif dan efisien agar kemandirian daerah tercapai. salah satunya yaitu PAD digunakan untuk belanja salah satunya belanja modal. belanja modal dilakukan untuk memperbaiki saran dan prasarana darah sehingga fasilitas daerah menjadi bagus (jalan, jembatan dll) sehingga dengan sarana dan prasaran yang bagus maka investor akan tertarik untuk masuk ke daerah tersbut sehingga otomatis dengan banyak investor masuk maka PE akan naik. jika sarana dan prasarana baik maka masyarakat daerah tersbut dapat melakukan kegiatan ekonomi sehingga PE akan naik. contohnya dengan dibuat kan jalan atau jembatan masyarakt bisa melakukan kegiatan perdagangan antar desa atau sesama daerah, dengan berjalannya roda ekonomi maka PE akan naik pula. Berdasarkan logika hipotesis dan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis:

Ho: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

## C. Model penelitian

Model penelitian yang dipakai berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan seperti gambar berikut:

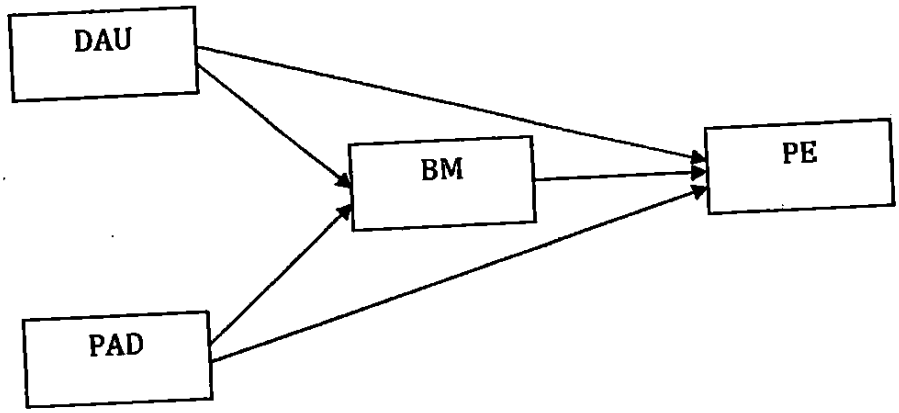


Gambar 2.1
Model Penelitian

Keterangan:
DAU : Dana Alokasi Umum
PAD : Pendapatan Asli Daerah
BM : Belanja Modal
PE : Pertumbuhan Ekonomi